

Laporan Pelaksanaan APBD 2011

Bupati Sampaikan Sembilan Temuan BPK

Johan Wahyudi
Borneo Tribune, *Mempawah*

Terdapat sembilan temuan dalam laporan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap APBD Kabupaten Pontianak 2011.

Temuan itu, disampaikan langsung Bupati Pontianak, Ria Norsan, pada sidang Paripurna Penyampaian Pidato Bupati atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2011 di Gedung DPRD, berapa waktu lalu.

"Laporan hasil pemeriksaan BPK terhadap pelaksanaan APBD 2011 menunjukkan adanya sembilan temuan. Lima temuan atas kepatuhan perundang-undangan dan empat temuan atas sistem pengendalian intern," kata Norsan,

dihadapan anggota DPRD.

Lanjutnya, hasil audit keuangan tersebut, membuat BPK memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Predikat WDP tersebut telah diterima Pemerintah Kabupaten Pontianak sejak lima tahun anggaran belakangan ini.

"Opini itu dinilai dari empat kriteria utama. Yakni, kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas pengendalian intern," ungkapnya.

Dimana Norsan menyampaikan, hasil audit BPK ini telah diterima sejak 24 Mei 2012. Sebagaimana Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 pasal 298 ayat (1) menyebutkan kepala daerah menyampaikan raperda per-

tanggungjawaban APBD paling lambat enam bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Secara garis besar, laporan pertanggungjawaban APBD Pemerintah Kabupaten Pontianak tahun 2011 terdiri dari beberapa poin. Yakni pendapatan mencapai Rp 553,45 miliar. Terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 22,23 miliar. "Kemudian, pendapatan transfer sebesar Rp 524,32 miliar serta lain-lain pendapatan yang sah sebesar Rp 62,79 miliar," katanya.

Selain itu, realisasi belanja daerah pada APBD 2011 sebesar Rp 522,02 miliar atau 89,35 persen dari anggaran belanja, setelah perubahan sebesar Rp 584,25 miliar. Sehingga terjadi efisiensi belanja sebesar Rp 62,23 miliar.

"Belanja tidak langsung

dianggarkan sebesar Rp 316,26 miliar dengan realisasi Rp 298,40 miliar. Sehingga terjadi efisiensi sebesar Rp 17,86 miliar. Belanja langsung sebesar Rp 268 miliar dan realisasinya Rp 223,63 miliar," katanya.

Sedangkan pembiayaan yang digunakan untuk menutupi defisit atau mengalokasikan surplus dalam APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan sebesar Rp 38,37 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp 1,51 miliar.

"Dari realisasi APBD 2011 terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 68,17 miliar. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan beserta anggota DPRD yang telah memberikan dukungan dan kerjasamanya," ungkap Norsan. □